



RENCANA KERJA

TAHUN 2025

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekeantinaan di pintu masuk negara. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, kami merasakan masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana.

Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT Tahun 2025 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Substansi/Sub Bagian dibawah Satuan kerja, diharapkan RKT 2025 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini, semoga dokumen ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 6 Januari 2025
Kepala,



Emmilya Rosa, SKM.,MKM

NIP. 197305251997032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	3
BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN	
A. Rencana Kinerja Tahunan	8
B. Sasaran Kegiatan RO dan Pendanaan	9
C. Rincian Kegiatan	10
BAB III PENUTUP	
A. Pemanfaatan RKT	14
B. Pemantauan Pelaksanaan RKT	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanggung jawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan apik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;
4. Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

1. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK dapat dibentuk Wilker BKK yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker BKK merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK. Wilker BKK dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional.
3. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK.
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BKK masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional dibagi tugas dalam 5 Tim kerja, yaitu :

- a. Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekearifan Kesehatan)
- b. Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angku dan Barang)
- c. Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan)
- d. Tim Kerja 4 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus)
- e. Tim Kerja 5 (Layanan Publik dan zona Integritas)

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Balai Kekearifan Kelas I Palembang per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan kepala kantor, 1 (satu) orang jabatan kepala sub bagian administrasi umum, 82 (delapan puluh dua) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 3 (tiga) orang Jabatan Pelaksana (JP). Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah :

1. Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
2. Kassubag Administrasi Umum : Heriyanto, ST, MKM

Tabel 1. 1 Jenis Jabatan Fungsional BKK Kelas 1 Palembang

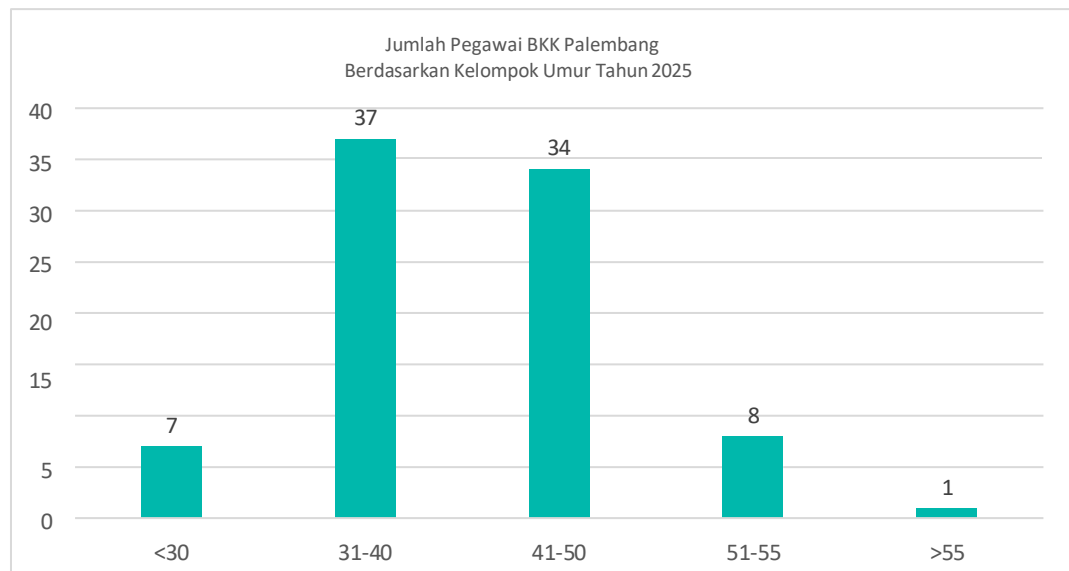
No	Jabatan	Jumlah
1	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JF)	1
2	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JF)	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	1
5	Asisten Apoteker Mahir (JF)	1
6	Asisten Apoteker Penyelia (JF)	1
7	Asisten Apoteker Terampil (JF)	1
8	Dokter Ahli Madya (JF)	3
9	Dokter Ahli Muda (JF)	6
10	Dokter Ahli Pertama (JF)	1
11	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	2
12	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	3
13	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	2
14	Entomolog Kesehatan Mahir (JF)	1
15	Entomolog Kesehatan Terampil (JF)	1
16	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	3
17	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	8
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	5
19	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JF)	1
20	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	1
21	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	1
22	Perawat Ahli Madya (JF)	1
23	Perawat Mahir (JF)	4
24	Perawat Penyelia (JF)	4
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	2
26	Pranata Komputer Ahli Muda (JF)	1
27	Pranata Komputer Ahli Pertama (JF)	1
28	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1
29	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	2
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JF)	1
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	3
32	Sanitarian Ahli Madya (JF)	1
33	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1
34	Sanitarian Ahli Pertama (JF)	5
35	Sanitarian Terampil (JF)	3
37	Perencana Ahli Pertama	2
38	Arsiparis Ahli Pertama	1
39	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1
40	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1
41	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
42	Pranata Humas Ahli Pertama	1
Jumlah		82

Pada Tahun 2025 masih terdapat 3 (tiga) pegawai yang memangku Jabatan Pelaksana, Jabatan Pelaksana terdiri dari :

Tabel 1. 2 Jenis Jabatan Pelaksana BKK Kelas I Palembang 2025

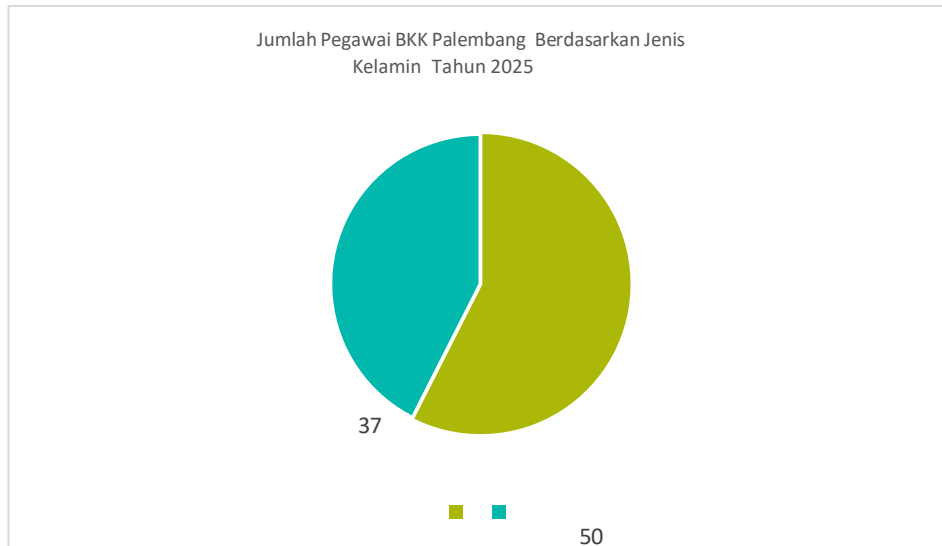
No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian	1
2	Pengelola Barang Milik Negara	2
Jumlah		3

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan kelompok umur , pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang atau sebesar 43,53%.



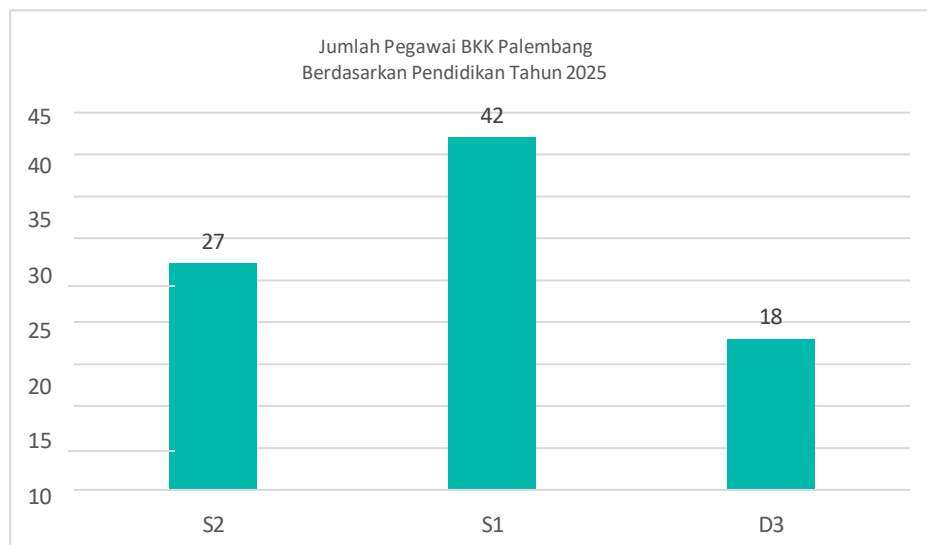
Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai BKK Kelas I Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

Jumlah Pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa komposisi ini terdapat diisi oleh pegawai Wanita sejumlah 50 (Lima Puluh) orang atau sebesar 57,47%



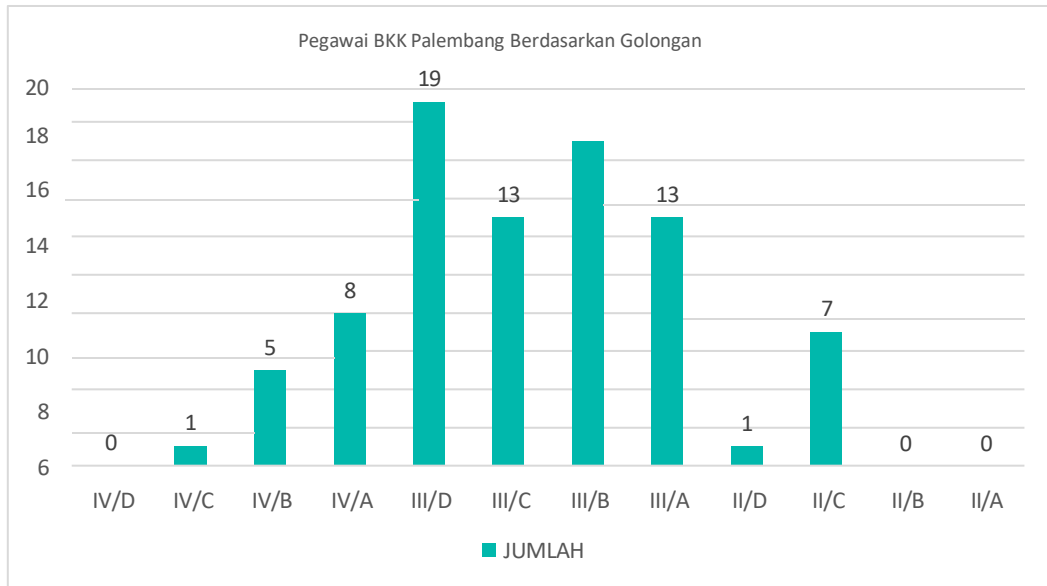
Grafik 1. 2 Jumlah Pegawai BKK Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jumlah Pegawai Balai Kekarantina Kelas I Palembang berdasarkan Pendidikan pada Grafik 1.2, dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh S1 sejumlah 42 (empat puluh dua) orang atau sebesar 48,28%, Tingkat pegawai dengan Pendidikan Diploma III sebanyak 18 (delapan belas) orang atau sebesar 20,69% sedangkan Pendidikan Pasca Sarjana berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang atau sebesar 32,93%.



Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai BKK Kelas I Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Jumlah pegawai Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 62 (enam puluh dua) orang atau sebesar 71,26%.



Grafik 1. 4 Pegawai BKK Kelas I Palembang Berdasarkan Golongan

BAB II

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA KERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
Program	:	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program yang didukung	:	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan. b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung d. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Program Dukungan Manajemen 1. Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kegiatan	:	1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

B. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN PENDANAAN

Tabel 2. 1 Anggaran Program, Kegiatan, RO, dan Pendanaan di BKK Kelas I Palembang

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target Tahun 2025	Alokasi 2025 (000)
1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara / PLBD.	0,92	2.537.373
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan		
		Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut		
		Layanan Survei Vektor PES		
		Layanan Survei Vektor DBD		
		Layanan Survei Vektor Malaria		
		Layanan Survei Vektor Diare		
		Layanan Deteksi Dini Terduga TBC		
		Layanan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit di Pelabuhan		
		Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)		
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I		
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I		
		Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk		
		2.		
Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara				
Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus				
3.	Indeks pengendalian pintu masuk negara	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	0,97	93.770
		Layanan Pengendalian Vektor DBD		
		Layanan Pengendalian Vektor Diare		
		Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV		
		Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)		
4.	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	88	250.105
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		Layanan Manajemen Keuangan		
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan BMN	96	15.994.758
		Layanan Umum		
		Layanan Perkantoran		
		Layanan Sarana Internal		
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	Pelayanan Hubungan Masyarakat	85	77.487
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		
		Layanan Reformasi Kinerja		
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pelatihan Kesehatan	85%	709.294
		Layanan Manajemen SDM		
8.	Persentase Realisasi Anggaran	-	96%	

A. Rincian Kegiatan

1. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan) dan Sumber Dana

Tabel 2. 2 Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan)

No	Rincian Output	Tahun 2025			Prakiraan Maju						Lokasi
		Volume	Satuan	Alokasi (000)	Volume			Alokasi (000)			
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	Koordinasi	18	Kegiatan	291.368	18	18	18	291.368	196.713	196.713	
a.	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan / Bandara / PLBD	18	Kegiatan	291.368	18	18	18	291.368	196.713	196.713	
2	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	180	Orang	32.190	180	1800	1800	32.190	87.270	87.270	
b.	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	180	Orang	32.190	180	1800	1800	32.190	87.270	87.270	
3	Pelayanan Publik Lainnya	628	Layanan	1.983.586	628	554	554	1.983.586	1.896.708	1.896.708	
a.	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	5	Layanan	198.848	5	5	5	198.848	179.240	179.240	
b.	Layanan Pemeriksaan Orang, barang, Alat Angkut	8	Layanan	484.558	8	7	7	484.558	461.668	461.668	
c.	Layanan Survei Vektor PES	40	Layanan	117.2240	40	40	40	117.2240	117.240	117.240	
d.	Layanan Survei Vektor DBD	100	Layanan	36.000	100	50	50	36.000	18.000	18.000	
e.	Layanan Survei Vektor Malaria	5	Layanan	8.600	5	16	16	8.600	27.520	27.520	
f.	Layanan Survei Vektor Diare	34	Layanan	18.020	34	34	34	18.020	18.020	18.020	
g.	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	12	Layanan	65.460	12	12	12	65.460	65.460	65.460	
h.	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	19	Layanan	349.600	19	19	19	349.600	349.600	349.600	
i.	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	19	Layanan	319.200	19	19	19	319.200	319.200	319.200	
j.	Layanan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit di Pelabuhan	50	Layanan	33.000	50	100	100	33.000	66.000	66.000	
k.	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	50	Layanan	44.000	50	70	70	44.000	61.600	61.600	
l.	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	100	Layanan	160.000	100	71	71	160.000	113.600	113.600	
m.	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)	20	Layanan	14.600	20	20	20	14.600	14.600	14.600	

	n	Layanan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit di Pelabuhan	100	Layanan	66.000	100	100	100	66.000	66.000	66.000
	o	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria Kategorori II	4	Layanan	6.880	4	14	14	6.880	13.580	13.580
	p	Layanan Pengendalian Vektor DBD	20	Layanan	24.520	20	20	20	24.520	24.520	24.520
	q	Layanan Pengendalian Vektor Diare	16	Layanan	7.712	16	16	16	7.712	7.712	7.712
	r	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV	12	Layanan	15.768	12	12	12	15.768	15.768	15.768
	s	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	14	Layanan	13.580	14	14	14	13.580	13.580	13.580
4	Sarana Bidang Kesehatan		5	Paket	575.599	5	5	5	575.599	1.190.823	1.190.823
	a.	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	5	Paket	575.599	5	5	5	575.599	1.190.823	1.190.823
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal		24	Layanan	16.041.087	24	27	27	16.041.087	19.757.610	19.757.610
	a.	Layanan BMN	4	Layanan	33.132	4	4	4	32.190	91.113	91.113
	b.	Pelayanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	45.339	3	3	3	45.339	49.748	49.748
	c.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	14.224	2	2	2	14.224	14.224	14.224
	d.	Layanan Umum	3	Layanan	90.174	3	4	4	90.174	97.503	97.503
	e.	Layanan Perkantoran	12	Layanan	15.858.218	12	12	12	15.858.218	19.490.638	19.490.638
6	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal		1	Unit	13.234	1	145	145	13.234	7.533.921	7.533.921
	a.	Layanan Sarana Internal	1	Unit	13.234	1	145	145	13.234	7.533.921	7.533.921
7	Layanan Manajemen SDM Internal		34	Orang	695.870	34	98	98	695.870	666.272	666.272
	a.	Pelatihan Kesehatan	34	Orang	695.870	34	98	98	695.870	666.272	666.272
8	Layanan Manajemen SDM Internal		83	Orang	13.424	83	98	98	13.424	666.272	666.272
	a.	Layanan Manajemen SDM	83	Orang	13.424	83	98	98	13.424	666.272	666.272
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal		16	Dokumen	268.029	16	15	15	268.029	387.860	387.860

a.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Dokumen	105.424	3	3	3	105.424	158.136	158.136
b.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen	84.852	4	3	3	84.852	85.968	85.968
c.	Layanan Manajemen Keuangan	7	Dokumen	58.829	7	7	7	58.829	125.832	125.832
d.	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	17.924	2	2	2	17.924	17.924	17.924
JUMLAH				19.914.387				19.914.387	-	-

B. Sumber Pendanaan

Tabel 2. 3

Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan di BKK Kelas I Palembang Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan danPengendalian Penyakit	13.335.774.000,-
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3.578.613.000,-
	Jumlah	19.914.387.000

Tabel 2. 4

Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana di BKK Kelas 1 Palembang Tahun 2025

No.	Uraian	Alokasi
1.	Rupiah Murni	18.555.252.000
2.	PNBP	1.359.135.000
	Jumlah	19.914.387.000

BAB III PENUTUP

A. Pemanfaatan RKT

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan turunan dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 , 2025-2029 (Renstra sedang dalam penyusunan) di BKK Kelas I Palembang, sedangkan RKT ini berjangka waktu satu tahun anggaran pada tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator kegiatan berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2025 BKK Kelas I Palembang akan melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit guna mendukung pencapaian RAP Ditjen PP.

Sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program dimungkinkan dokumen perencanaan inidilakukan review atau revisi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan dan pencapaian sasaran. Berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen perencanaan ini akan tetap diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk melakukan koreksi sesuai dengankebutuhan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun untuk tahun 2025 yang dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Pedoman dalam pelaksanaan program di BKK Kelas I Palembang untuk Tahun 2025 Sebagai acuan bagi BKK Kelas I Palembang untuk mencapai target-target kegiatan yangakan dicapai dalam jangka pendek.
2. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh ASN di BKK Kelas I Palembang dalam meningkatkankualitas kegiatan layanan kepada Masyarakat.
3. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutuayanan Kesehatan di BKK Kelas I Palembang.

B. Pemantauan Pelaksanan RKT

Dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan darinya.

Pemantauan pelaksanaan Indikator Program di BKK Kelas I Palembang dilaksanakan secara:

1. Aplikasi

Secara Aplikasi Pemantauan program dilakukan secara periodik setiap bulan, dan dilakukan penginputan hasil pemantauan yang telah dilakukan rekapan dari masing-masing subbag administrasi umum dan substansi.

- Aplikasi E-Monev DJA yang merupakan aplikasi Given dari Kementerian Keuangan, aplikasi ini mengevaluasi realisasi volume rincian output dan anggaran yang dilakukan setiap bulannya. Aplikasi E Monev DJA juga untuk melakukan pemantauan indikator Kinerja Anggaran yang akan dilaporkan setiap semester dan tahunan.
- Aplikasi E-Monev Bappenas yang merupakan aplikasi given dari Kementerian Bappenas, aplikasi ini untuk mengevaluasi setiap bulan Komponen dan Rincian Output Satker dan juga anggaran setiap Komponen kegiatan yang dilakukan setiap bulannya.
- Aplikasi E-Performance yang merupakan aplikasi given dari Kementerian Kesehatan, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemantauan capaian indikator perjanjian kinerja yang dilakukan setiap bulan.

2. Rapat Internal

Pemantauan secara internal dilakukan secara terpadu antara Kepala Kantor, Kasubbag ADUM dan Koordinator masing-masing substansi dan JFT/JFU. Pemantauan dilakukan secara periodik secara tri wulan dan semesteran melalui rapat internal lingkup BKK Kelas I Palembang. Sebelum dilakukan rapat pemantauan internal ke Subbag ADUM dan masing-masing substansi akan dikirimkan form capaian program kegiatan setiap bulan yang hasilnya akan dilakukan perekapan untuk mengetahui capaian dari indikator yang telah ditetapkan di awal tahun melalui Perjanjian Kinerja.

